

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Halim (2002) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pada periode tertentu.

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Laporan keuangan perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (*disclosure*) mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Keberadaan laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka menciptakan *good governance*.

Menurut Kawatu (2019: 7) pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan

untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektifitas.

Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Karena tidak semua orang bisa membaca laporan keuangan, maka untuk menerjemahkan informasi dalam laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan dan bagaimana mengevaluasi laporan keuangan (Mahmudi, 2016: 13).

Analisis laporan keuangan adalah kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2016:89). Analisis laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan, menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Analisis laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas. Latar belakang perlunya dilakukan analisis atas laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.05/2014, yaitu sebagai berikut:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan (termasuk lampiran) tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
2. Terdapat perbedaan antara data yang disajikan dalam hardcopy/softcopy, dan CaLK;
3. Pengungkapan dalam CaLK seringkali kurang informatif.

Menurut Harahap (2013) analisis keuangan merupakan upaya untuk menentukan karakteristik keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan. Analisis angka-angka keuangan utama dilakukan dengan cara membandingkan hasil kinerja dari satu periode yang sudah berjalan ke periode yang selanjutnya, sehingga dapat terlihat adanya peningkatan kinerja atau tidak dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu adanya ketelitian dalam penyusunan laporan keuangan untuk dapat berjalan lancar proses analisis dan evaluasinya. Menurut Mahmudi (2016: 88), mengevaluasi dan mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan atau lembaga menggunakan beberapa metode analisis seperti analisis varians, analisis indikator keuangan, analisis pertumbuhan, analisis regresi, dan analisis prediktif.

Mahmudi (2016: 105) lebih lanjut menjelaskan bahwa masih kurangnya informasi pendapatan di sektor publik terhadap angka-angka perhitungan keuangan terutama di sektor korporasi yang tidak dapat diaplikasikan di sektor publik. Namun, masih ada kemungkinan terdapat analisis indikator keuangan yang memungkinkan dapat digunakan seperti di sektor bisnis maupun sektor publik, seperti halnya analisis solvabilitas dan analisis likuiditas.

Dalam penelitian ini analisis rasio keuangan yang digunakan adalah analisis solvabilitas anggaran. Analisis solvabilitas anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan untuk mendanai operasinya selama satu periode anggaran keuangan (Nollenberger *et al.*: 2003). Dengan demikian, indikator dimensi ini harus menunjukkan keseimbangan antara pendapatan normal pemda (yaitu sebagai pembilang) dan pengeluaran operasional (yaitu sebagai penyebut) selama satu periode. Kemampuan ini diukur dengan rasio. Semakin tinggi nilai rasio-rasio tersebut maka semakin banyak pendapatan pemda yang tersedia untuk untuk membiayai belanja operasional pemerintah daerah. Ini berarti bahwa pertumbuhan nilai-nilai rasio ini menunjukkan kondisi solvabilitas anggaran yang membaik.

Menurut Kasmir (2016:150), rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Seberapa besar hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (*dilikuidasi*).

Menurut Noor Anisyah dan Syahran (2022) selama ini analisis rasio solvabilitas lebih banyak diterapkan pada perusahaan. Dalam penelitian ini penulis menerapkan pada pemerintahan daerah. Menurut UU no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Sampai dengan saat ini, belum ada pemerintah daerah yang secara rutin melakukan analisis kondisi keuangan. Sebagaimana pemerintah daerah yang lain, Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pun masih belum memiliki kepedulian yang besar terkait pemantauan kesehatan keuangan daerahnya. Perlu disadari bahwa opini BPK tidak hanya merupakan penilaian pertanggungjawaban kinerja keuangan dibandingkan dengan penganggaran dari sisi ketaatan terhadap prosedur saja. Opini BPK bukan indikator utama yang representatif untuk merefleksikan kesehatan keuangan daerah secara riil.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis solvabilitas anggaran, dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul **“Analisis Solvabilitas Anggaran pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun anggaran 2016-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah **“Bagaimana solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016-2020?”**

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian menjadi lebih terarah maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya dengan mengangkat mengenai rasio solvabilitas, indeks rasio solvabilitas, dan indeks dimensi solvabilitas pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016-2020.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016-2020 menggunakan analisis solvabilitas anggaran.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi tentang analisis solvabilitas anggaran dan menjadi referensi penelitian selanjutnya untuk merumuskan masalah baru dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat anggaran pendapatan yang nantinya dapat direalisasikan dengan baik sehingga tersedia untuk membiayai belanja operasional.